

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI RIAU

Nina Hartiningsih¹⁾
Edyanus Herman Halim²⁾

¹⁾Mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Riau

²⁾Dosen pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Abstract. *This study aimed to test the Regional Income Effect on Capital Expenditure in Riau Province. The analysis method used in this research is descriptive method with regression testing to test the classical assumption prior to getting the best research model. The variable in this study is the Regional Tax, Regional Fees and Other Legal PAD as an independent variable and capital expenditures as the dependent variable. The population was Riau Provincial Government Budget Realization. Sample research is Actual Budget 12 districts / cities in Riau Province in 2008 to 2012.*

These results prove that simultaneous local taxes; levies and other legal PAD effect on capital expenditure in Riau Province. In partial, local taxes and other legal PAD effect on capital expenditure in Riau Province. While local levies no effect on Capital Expenditure.

Keywords: *local taxes; levies; other PAD legitimate and capital expenditure.*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi daerah otonomi pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. (Halim, 2009)

Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. Sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah semestinya memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut ditunjukkan dengan peranan Pendapatan Asli Daerah yang

signifikan di dalam membiayai Belanja Daerahnya .

Penelitian ini merupakan replikasi dan konstruksi pemikiran yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah penelitian, waktu penelitian, lokasi serta karakteristik, sosial ekonomi dan sumber daya alamnya. Pengkajian dan penelitian terdahulu telah banyak dilakukan tentang pengaruh dan hubungan pendapatan daerah terhadap belanja daerah terutama pada belanja modal.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Riau?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Riau?
3. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Riau?
4. Apakah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja modal di Provinsi Riau?

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengertian keuangan daerah menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam pengelolaan keuangan daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri.

Sumber-sumber pendapatan bagi daerah (Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 dan 159) terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa:

PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya (Mukhlis, 2010) Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara,

artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

c. Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemilikinya. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang sah diluar dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD. Misalnya hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, penerimaan cicilan kendaraan bermotor / rumah dinas, penerimaan sewa rumah dinas / bangunan dan tanah milik daerah pemerintah daerah, dan lain-lain yang diatur dalam UU NO 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 2.

Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggara kannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: "Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya".

Belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam mengelola belanja modal ini Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagi ke dalam enam pos, yaitu:

1. Belanja Jalan, Irigasi, dan lainnya
2. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Aset Lainnya
4. Belanja Tanah
5. Belanja Mesin
6. Belanja Gedung dan Bangunan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dan konstruksi pemikiran yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pangabean (2009) meneliti tentang

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir dengan variabel penelitian PAD dengan indikator Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah; dan Belanja Daerah. Penelitian ini mendapatkan hasil secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Secara parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Kurniawati (2010) meneliti dengan judul Pengaruh Dana lokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten di Indonesia mendapat hasil DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah: PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Sejalan dengan penelitian Kurniawati, Hadiati (2013) menemukan hasil bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, Abdullah (2008) meneliti pengalokasian belanja fisik dalam penganggaran pemerintah daerah dengan studi empiris atas determinasi dan konsekwensinya terhadap belanja pemeliharaan menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan, bantuan pemerintah berpengaruh terhadap belanja modal sementara PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini didukung oleh

Wandira (2013) meneliti pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal dan mendapat hasil DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau dengan menggunakan data sensus selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2008-2012. Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan sample dalam penelitian adalah 12 Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kota Dumai
3. Kabupaten Bengkalis
4. Kabupaten Indragiri Hilir
5. Kabupaten Indragiri Hulu
6. Kabupaten Kampar
7. Kabupaten Kuantan Singingi
8. Kabupaten Pelalawan
9. Kabupaten Rokan Hilir
10. Kabupaten Rokan Hulu
11. Kabupaten Siak
12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Data yang dijadikan sampel pada penelitian ini (n) sebanyak 60, yang mencantumkan data-data mengenai Realisasi Anggaran yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Belanja Modal. Data yang didapat tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 19.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependent diwakili oleh Belanja Modal yang berasal dari seluruh realisasi belanja modal. Pengukuran menggunakan angka rasio dari nilai belanja modal dalam realisasi belanja daerah.

Variabel Independent diwakili oleh:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini dilihat jumlah realisasi penerimaan pajak daerah. Realisasi pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak daerah di Provinsi Riau yang meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Pengukuran menggunakan angka rasio dari nilai penerimaan pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dalam penelitian ini dilihat realisasi penerimaan. Pengukuran menggunakan angka rasio dari nilai penerimaan retribusi daerah.

3. Lain-Lain PAD yang Sah

Merupakan pendapatan daerah yang tergolong pada hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Pengukuran menggunakan angka rasio dari nilai penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sensus berupa data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode pengamatan. Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Kekayaan Negara, Badan Pusat Statistik Perwakilan Riau dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Data yang didapat tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 19 Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

X₃ = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali (2011)). Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat diseteksi melalui 2 cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik (Uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*).

Tabel 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja Modal	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang Sah
N		60	60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	363.7057	97.6968	14.4035	31.8108
	Std. Deviation	284.17975	521.32624	14.53712	26.05371
Most Extreme Differences	Absolute	.260	.430	.185	.191
	Positive	.260	.430	.185	.191
	Negative	-.114	-.426	-.161	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		2.013	3.332	1.435	1.476
Asymp. Sig. (2-tailed)		.311	.124	.233	.226

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

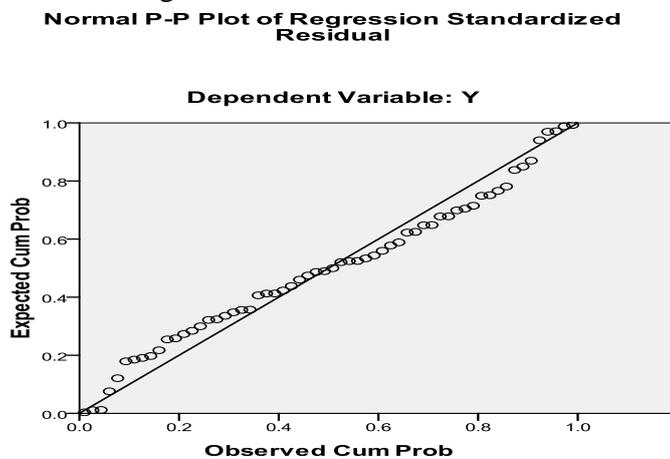
Hasil uji data pada Tabel 1 di atas didapatkan nilai K-S Belanja Modal sebesar 2.013. Nilai K-S Pajak Daerah sebesar 3.322. Nilai K-S Retribusi Daerah sebesar 1.435. Nilai K-S Lain-lain PAD yang Sah sebesar 1.476. Nilai ini tidak signifikan pada 0,05 (karena nilai *P*: belanja modal 0.311; pajak daerah 0.124; retribusi daerah 0.233 dan lain-lain PAD yang sah: 0.226, sehingga

total nilai *P* = 0,894, lebih besar dari $\alpha = 0.05$) (Ghozali, 2011) Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran

data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1. Normal P-P Plot Regression Standardized Residual



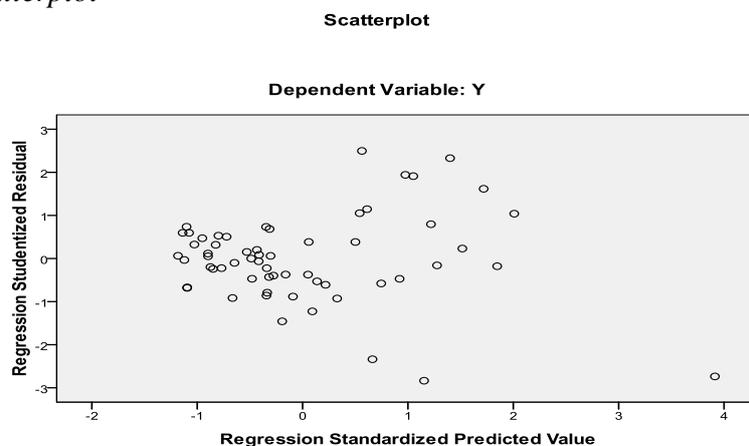
Sumber: Data Olahan SPSS

Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik, yaitu uji *Scatterplot* dengan melihat grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel

dependen yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Apabila scatterplot tidak membentuk pola yang jelas serta data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada model yang diuji. Grafik *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. *Scatterplot*



Sumber: Data Olahan SPSS

Hasil yang ditunjukkan pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola tertentu serta data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dimana hal ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami heterokedastisitas, yang berarti model regresi layak dipakai untuk memprediksi kelengkapan laporan tahunan berdasarkan masukan variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah.

Analisis Regresi

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda.

Pengujian Model Regresi

Untuk mengetahui apakah model pengujian hipotesis dilakukan dengan tepat, dapat dilakukan pengujian dengan membandingkan signifikansi dengan *Beta* (β). Dalam penelitian ini digunakan $\beta = 5\%$ yang artinya kemungkinan kesalahannya hanya boleh lebih kecil atau sama dengan 5%. Jika signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan model tersebut sesuai (*fix*) untuk dijadikan sebagai model penelitian. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 maka model tersebut tidak sesuai (*non-fix*) untuk dijadikan sebagai model penelitian. Tabel 4 menunjukkan hasil analisis model regresi, yaitu analisis regresi berganda untuk model regresi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.188	0.455		2.639	.011
X1	.106	.051	.195	2.093	.041
X2	0.025	0.161	.132	1.598	.016
X3	0.091	0.113	.843	9.079	.000

Sumber: Data Olahan SPSS

Pada Tabel 2 di atas, dapat dilihat masing-masing signifikansi variabel independen kurang dari 0,05 yaitu 0,041; 0,016; dan 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dapat diterima. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dituliskan Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

X₃ = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

e = Error

Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh persamaan faktor beta yang

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

$$BM = 0,188 + 0,106 \text{ Pajak Daerah} +$$

$$0,025 \text{ Retribusi Daerah} +$$

$$0,091 \text{ Lain-lain PAD yang Sah}$$

Uji Goodness of Fit

Adjusted - R Square, yaitu suatu sifat penting R² dimana nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada didalam model. Oleh karena itu, untuk membandingkan dua R² dari dua model harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada didalam model ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan *Adjusted - R Square*, seperti pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.619	.598	.84922

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari Tabel 3 di atas dapat disimpulkan:

1. Angka *Adjusted - R Square* atau Koefisien Determinasi adalah 0,598. Dengan demikian, variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah, dapat menjelaskan variabel Belanja Modal sebesar 59,8% sedangkan sisanya 40,2% (100% - 59,8%) dipengaruhi oleh variabel-variabel

lain yang tidak teramati dalam dalam penelitian.

2. *Standart Error of Estimate (SEE)* adalah 0,84922 (satuan yang dipakai adalah variabel dependen/ *Belanja Modal*). Semakin kecil *SEE* akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen (*Belanja Modal*).

Pengujian Hipotesis

Untuk melihat pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal secara parsial, dilakukan uji *t*, nilai *t* dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 4. Uji *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	118.888	45.055		2.639	.011
X1	.106	.051	.195	2.093	.041
X2	2.586	1.618	.132	1.598	.116
X3	9.193	1.013	.843	9.079	.000

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal secara parsial adalah:

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari hasil pengolahan data, diperoleh $t_{hitung} = 2,093$ dengan $Sig.=0,041$. Pada $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k = 60 - 1 = 59$ diperoleh $t_{tabel} = 1,671$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} (2,093) > t_{tabel} (1,671)$, yang artinya Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₂ : Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Retribusi Daerah dengan $t_{hitung} = 1,598$ dengan $Sig.= 0,116$. Pada $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k = 60 - 1 = 59$ diperoleh $t_{tabel} = 1,671$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} (1,598) < t_{tabel} (1,671)$, yang

artinya bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₃ : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan $t_{hitung} = 9,079$ dengan $Sig.= 0,000$. Pada $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k = 60 - 1 = 59$ diperoleh $t_{tabel} = 1,671$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} (9,079) > t_{tabel} (1,671)$, yang artinya bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Lebih lanjut dilakukan uji *F* untuk melihat pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan terhadap Belanja Modal yang dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 5. Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2947320.083	3	982440.028	30.272	.000 ^a
	Residual	1817409.536	56	32453.742		
	Total	4764729.620	59			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh F -hitung 30,272 dengan Sig.= 0,000. pada $\alpha = 0,05$ diperoleh F -tabel 2,7581. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F -hitung (30,272) $> F$ -tabel (2,7581), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pajak daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pendapatan pemerintah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau.

Secara bersama-sama Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal bagi pemerintah Provinsi Riau.

Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka saran yang penulis ajukan adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan data yang diambil dari metode *survey* dan menambah variabel yang mungkin berpengaruh untuk menguji Belanja Modal, karena masih ada faktor lain yang berpengaruh terhadap Belanja Modal yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini, seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian sebaiknya lingkup penelitian diperbesar. Penelitian tidak hanya pada lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau saja sebagai sampel, tetapi juga pada lingkup pemerintahan atau instansi lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan metode analisis lain. Seperti uji beda, *path* analisis atau kuesioner.

Kepada Pemerintah Daerah, disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Belanja Modal dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), demi pembangunan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aprilla, Nila. 2013. *Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jurnal Akuntansi UNIB, Volume 3, Nomor 2, Juli 2013.
- Arbie Gugus Wandira. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Dini Arwati, Novita Hadiati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*, Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). Semarang. 16 November 2013.
- Ebit Julitawati, Darwanis, Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*, Jurnal Akuntansi. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1. No. 1. Agustus 2012.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 1995, *Basic Econometrics*, Edisi 3, McGrawhill, New York.
- Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Study Kasus Kabupaten /Kota di Jawa dan Bali*. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.
- Haryo, Kuncoro. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Artikel. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Iqbal, Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian dan Statistik*. Jakarta: BumiAksara.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan A.A.N.B. Dwirandra. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi*. Tesis S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali. (tidak dipublikasikan)
- Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota. dan Kabupaten di Indonesia*. TESIS. Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Kusumayoni. 2004. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah*

- dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di Kab.Klungkung*. Tesis S2. PPS UNPAD. Bandung (tidakdipublikasikan).
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pangabea, Hendri Edison H. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*.Tesis S2 USU. Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sheila Ardhian Nuarisa, 2013, *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.